

Dialektika Media Massa: Menelusuri Akar Konflik Media dalam Pemberitaan Seputar Warga Adat Besipae

The Dialectics of Mass Media: Tracing the Roots of Media Conflict in Reporting on the Besipae Indigenous People

Innosensia E Isavela Nd Satu

Universitas Katolik Widya Mandira
Jalan San Juan No 1. Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Email: innosensiasatu@unwira.ac.id

Received : April 12, 2025 ; Revised: June 9, 2025; Accepted: August 10, 2025

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk memetakan jaringan konflik yang terartikulasi dari permainan media (*media game*). Peran media sebagai kanal pencerahan publik tetapi berpotensi untuk memobilisasi sentimen dan emosi massa yang diprakarsai oleh pemilik dan industri media. Media-media lokal seperti koran atau surat kabar Pos Kupang dan Victory News adalah cerminan media lokal yang tidak bisa dipisahkan dari oligarki media. Selain itu platform media digital sebagian besar memiliki pola yang kurang lebih serupa dengan tren media koran. Letak perbedaannya pada sumber berita yang memungkinkan pihak individu untuk memproduksi berita secara mandiri, tetapi tetap dalam kerangka nalar dominan industri media besar. Penelitian ini menjadi krusial karena jaringan konflik kepentingan dari media-media *mainstream* ketika berkonfrontasi dengan platform media digital. Warga Besipae tercerabut dari substansi eksploitasi material dan bergeser menjadi konflik media dalam spektrum yang lebih eksekutif. Artikel ini menggunakan metode kritis dengan pisau analisis atau kerangka teori dari Adorno yang skeptis terhadap sterilisasi media sebagai instrumen pemberitaan netral. Media kerap kali merepresentasikan ideologi industri untuk melegitimasi eksploitasi dan kapitalisme. Selain itu, di sisi lain kerangka teoritis dari Derrida dianggap cocok sebagai prosedur mediatif dalam mendekonstruksi tren media dominan yang selama ini belum mengangkat kepentingan kelas sosial tertindas. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa media tidak steril kepentingan dan karenanya lebih merepresentasikan konflik dan alienasi kelas sosial warga Besipae ketika ditempatkan sebagai objek pemberitaan dan bukan subyek.

Kata kunci: Adorno; Besipae; Konflik Kepentingan; Media; Propaganda

Abstract

This article aims to map the articulated conflicts of media games. The media plays a role as a channel for public enlightenment but has the potential to mobilize mass sentiment and emotions initiated by media owners and industries. Local media such as newspapers or newspapers such as Pos Kupang and Victory News are reflections of local media that cannot be separated from media oligarchy. Additionally, digital media platforms largely follow patterns similar to those of newspaper media trends. The key difference lies in the news sources, which allow individuals to produce news independently, yet still within the dominant framework of the large media industry. This research is crucial due to the

intertwined conflicts of interest between mainstream media and digital media platforms. Residents of Besipae are uprooted from the substance of material exploitation and shifted into media conflicts within a more excessive spectrum. This article employs a critical method using Adorno's theoretical framework, which is sceptical of media sterilisation as a neutral reporting tool. Media often represents industrial ideology to legitimise exploitation and capitalism. Furthermore, Derrida's theoretical framework is considered suitable as a mediative procedure in deconstructing dominant media trends that have so far failed to raise the interests of the oppressed social classes. The findings of this research illustrate that media is not free from interests and thus more accurately reflects the conflicts and social alienation of Besipae residents when they are positioned as objects of reporting rather than subjects.

Keywords: *Adorno; Besipae; Conflict of Interest; Media; Propaganda*

1. Pendahuluan

Konflik agraria yang terjadi di Hutan Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meninggalkan ketegangan antara pemerintah, industri media, dan komunitas lokal yang mendiami dan mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun. Praktik eksklusif lahan yang mengatasnamakan proyek pembangunan telah berdampak langsung terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat (Dhosa, 2021).

Dalam penelitian terdahulu di atas menampilkan kehidupan sehari-hari, warga di Hutan Besipae terlibat dalam aktivitas pertanian, pengelolaan hasil hutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proses alih fungsi lahan dan eksplotasi alam yang melibatkan perubahan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan kapitalistik telah menyebabkan eksklusif sosial dan ekonomi terhadap manusia (Saito, 2023)(Marx, 1887).

Negara mengklaim lahan di areal hutan Besipae adalah tanah negara yang telah diserahkan oleh suku-suku pada tahun 1982 untuk

pengembangan proyek ternak sapi bersama Australia. Sementara itu, warga lokal menuntut keadilan setelah berakhirnya kontrak tanah. Merujuk anatomi konflik di atas, riset ini berikhtiar untuk mengungkap bagaimana peran media ketika mengambil peran sentral dalam mendistorsi lahirnya kesadaran kritis warga.

Akibatnya, absennya akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan; jaringan sosial komunitas terguncang; dan identitas kolektif sebagai masyarakat agraris mulai tergerus (Nakayama et al., 2019). Kondisi ini tidak berhenti pada beberapa hal tersebut, tetapi juga memunculkan krisis komunikasi; ketimpangan informasi, serta marginalisasi suara minoritas dalam ruang publik, terutama melalui media.

Pada bagian ini media menempati posisi sentral sebagai tulang punggung masyarakat demokratis. Media perlu membebaskan diri dari rasionalitas industri media dengan menyediakan jalan pencerahan bagi terwujudnya visi emansipasi masyarakat. Ketika kasus Besipae muncul sebagai

spektrum dari lokasi pemberitaan media, di sini terlihat aneka sudut pandang yang sarat ideologis.

Media lokal seperti Pos Kupang adalah salah satu surat kabar dengan intensitas pemberitaan tertinggi dan bersifat “abu-abu”. Pos Kupang dengan reputasi sebagai surat kabar dengan segmentasi pasar terluas di Nusa Tenggara Timur tetapi kerap memberitakan kasus Besipae secara kompromistis. Alih-alih tidak mendukung masyarakat dalam motif menunda kemenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun media ini belum cukup merepresentasikan keberpihakan terhadap *disempower class* dari kelompok kelas sosial warga okupan.

Di dalam sudut pandang media sebagai alat advokasi semestinya perlu menekankan posisi pro-kelompok lemah yang dengan keterbatasan akses dan aset (Lim, 2025), namun sikap naif, *ergo* Media Victory News. Sebagai surat kabar milik mantan Gubernur NTT, Victor Laiskodat, media ini lebih mirip sebagai *media darling* atau “*buzzer istana*” untuk memberitakan cerita sukses, yang sebenarnya lebih mirip ilusi pembangunan.

Berbeda dengan media lain, beberapa surat kabar yang dikelola oleh aliansi masyarakat sipil, *by default* sebagai kanal perjuangan untuk merepresentasikan suara-suara minor warga Besipae yang tidak pernah direpresentasikan dalam sistem representasi yang ada.

Berita dari media-media kritis terhadap media *mainstream* masih menghadapi tantangan sehingga kurang lantang dalam sistem pasar media pemberitaan, dan olehnya tidak berbunyi dalam pasar media, serentak

terpinggirkan dalam pertarungan algoritma predatoris. Di dalam *logic of news* berlaku faktualitas dan unsur *novum* dari berita. Naifnya apa yang dinamakan kebaruan itu kerap kali justru berpartisipasi dalam trend media massa kapitalis dan budaya populer yang merupakan bagian dari daya tahan dan kekuatan kontinuitas kapitalisme.

Akibatnya sidang pembaca (warga sipil) menjadi kurang berdaya dan tercerahkan sehingga permisif dan kompromistis terhadap produk-produk industri media atau melayani sistem kapitalisme. Oleh sebab itu peran serta dari media-media kritis adalah sebuah tradisi organik yang dalam bahasanya Theodor Adorno, “Dialektika Negatif” atau suatu posisi dari anti-kemapanan dalam pengertian ini, diartikulasikan oleh media-media pro perubahan sosial. Inti dialektika ini ialah perlunya pembebasan cara berpikir masyarakat dari ketergantungan pada karakter ekonomisme yang mendekatkan diri pembaca pada kesadaran-kesadaran palsu.

Pendekatan Adorno memberikan signifikansi kritis terhadap pelbagai distorsi pemberitaan media bahwasanya negativitas total adalah suatu keadaan ketika selamanya muncul suatu rasionalitas yang diusung sebagai corak anti-sistem, yang mencoba membendung kebekuan dari sintesis pemberitaan (tren ini biasanya muncul sebagai kerangka etis dari pemerintah dan pemilik modal) tentang efektivitas dari kapitalisme.

Relevansi negativistis dialektika dalam media sebagai antisipasi bagi kecenderungan produksi konten-konten yang memfeitkan berita

tentang wajah konfliktual di antara warga Besipae sekadar problem ekonomi, dan bukan ekologi, sosiologi, atau filsafat sosial. Pendekatan Adorno skeptis terhadap sterilisasi media sebagai instrumen pemberitaan netral. Media kerap kali merepresentasikan ideologi dominan pasar sebagai jiwa destruktif dari kapitalisme, homogenisasi budaya, dan kuasa media untuk melegitimasi eksploitasi dan penindasan. Kalangan media adalah suatu kelas sosial yang sebenarnya lebih bertanggung jawab dan sudah berwatak aliansi predatoris negara, khususnya apabila tidak menjalankan visi imperatif etisnya untuk membebaskan keterasingan komunitas sosial warga Besipae ketika mereka ditempatkan sebagai objek pemberitaan dan bukan subyek.

2. Kerangka Teori

Secara umum, konsep “Dialektika Negatif” menurut Filsuf Marxis *Frankfurt School*, Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) memperlihatkan pereduksian terhadap sintesis yang kerap mengusung kerangka etis dan metafisik sebagai ideologi dominan (O'Connor, 2004). Melalui industrialisasi di dalam media, dalam kenyataannya politik dan ekonomi memproduksi kebutuhan dan keinginan semu dari pemberitaan untuk mengerangkeng masyarakat. Asal usul pereduksian dialektika mewarisi logika Hegelian dan Kantian. Dalam situasi patuh tersebut masyarakat dibungkam daya kreatifitasnya sehingga proses dehumanisasi terjadi karena persetujuan masyarakat secara tidak sadar dalam masif media di era revolusi industri kontemporer.

Kapitalisme dan industrialisasi diperluas tidak saja pada masyarakat modern tapi juga menjangkau semua lapisan masyarakat untuk menguatkan kebenarannya yang tunggal. Pada intinya melalui keuntungan dan pertukaran komoditi sebagai standar kebutuhan masyarakat.

Industrialisasi yang dipakai oleh kekuasaan menekan masyarakat begitu kuat hingga masyarakat melihat alam pun sebagai sesuatu obyek yang perlu didominasi. Para filsuf mazhab Frankfurt lainnya memiliki pergulatan pikiran yang sama dalam mendefinisikan realitas tersebut. Kondisi yang mana diucapkan oleh Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) yaitu dunia yang teradministrasi, atau menurut Max Horkheimer (1895-1973) dengan istilah organisasi irasional (Max Horkheimer & Theodor-Adorno, n.d.).

Fenomena konfliktual media di Besipae bersinggungan dengan gugus pikiran Adorno sendiri di mana kebenaran dihomogenisasi untuk reifikasi media. Realitas deskriptif di atas menunjukkan kalau masyarakat dibentuk oleh kekuasaan dengan rasionalitas yang mengandalkan kekuatan analitis-empiris dan bersifat instrumental.

Pemanfaatan teknologi dan pasar media telah melumpuhkan semua kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Meredupnya entitas masyarakat sekaligus menguatkan penalaran pembangunan melalui reifikasi, hegemoni, tanpa tawaran yang memperlihatkan alternatif. Masyarakat terkondisikan seturut perbedaan kelas-kelas, dialienasikan, dan pemalsuan kebutuhan masyarakat

dari arogansi pembangunan. Masyarakat kini menjadi sangat deterministik dan kehilangan sikap kritis sebab dikendalikan oleh logika empiris yang batas-batasnya dikendalikan oleh kenyataan objektif. Oleh sebab itu melalui kesadaran dialektis dengan representasi negativitasnya Adorno dan penegasian berikhtiar membuka selubung irasionalitas yang secara ideologis menutup kesadaran kritis masyarakat.

Kehendak pembangunan untuk menertibkan berarti sekaligus niat untuk kemapanan. Dengan merujuk pada pikiran dari Jacques Derrida (1930-2004) dapat kita pahami bahwasannya tren media saat ini yang mengklaim diri berkorespondensi dengan keadilan hanya merupakan bekas (*trace*). Bekas itu akan hilang bila ada rejuvenasi suatu logika dan etika yang memihak pada warga (Derrida, 1995). Pandangan ini harus didekonstruksi (dibongkar) bila diinginkan solusi atas dilema injustice pada warga Besipae perempuan dan anak.

Mekanisme penertiban pengungsi melalui rezim media bukanlah suatu *sovereign power* melainkan *disciplinary power*. Ciri yang menonjol ialah kecenderungan berpikir biner yang hirarkis. Dengan anggapan bahwa warga Besipae khususnya perempuan dan anak hanya sebagai derivasi, sekunder, dan manifestasi pinggir dalam kaitanya terhadap laki-laki. Dalam usaha-usaha tersebut maka kekuasaan media menormalisasi kelakuan untuk membendung perjuangan warga melalui perendahan martabat warga perempuan (bandingkan aksi demonstrasi perempuan Besipae yang

bertelanjang dada). Proses pembiasaan ini akan didaratkan dan diinternalisasikan melalui proses penormalan. Artinya warga Besipae harus merasa maklum jika dia memperoleh perlakuan marginalisasi, karena warga itu tidak harus tunduk di hadapan negara, lebih-lebih perempuan dan anak.

Ironi dalam perlakuan marginalisasi terbukti datang dari aparat keamanan (polisi). Perlakuan itu bahkan ketika warga sedang menyuarakan aspirasinya, mereka mengalami kriminalisasi (bandingkan kasus Nikodemus Manao). Gugus Teori Adorno dan Derrida di atas berpijak sebagai pisau analisis dengan logika induktif dalam memetakan wajah konflikual Besipae berbasis elaborasi metode kritis.

3. Metode Penelitian

Kajian ini memilih menggunakan paradigma post-positivistik dengan metode yang digunakan dalam khazanah kritis (Creswell, 2018). Metode kritis sendiri mengacu pada gerakan membongkar segala tatanan kemapanan secara lebih komprehensif dalam memperoleh data deskriptif dari tren berita langsung atau tidak langsung dari media massa dan perilaku empirikal warga yang tampak.

Inilah cara mendekati dunia empiris secara realistis sistemik. Jadilah metode kritis yang bertumpuh pada paradigma kritis dan interpretatif (VanderStoep & Johnston, 2009). Dalam metodologi kritis, peneliti melihat pengaturan dan subyek secara holistik; manusia, *rule*, atau komunitas tidak direduksi menjadi variabel, tetapi dipandang sebagai keseluruhan. Peneliti kritis

mempelajari orang-orang dalam konteks historis dan kondisi seperti apa orang-orang mendefinisikan kesadarannya. Sebab saat kita mereduksi ucapan dan tindakan subyek menjadi sekadar persamaan grafis dan pertumbuhan, maka peneliti rentan melupakan sisi humanitas dari aspek sosial-ekologis. Pendekatan kritis selalu luwes dalam mendekonstruksikan realitas sosial secara partisipatoris.

Peneliti kritis bertindak sebagai seorang tabib dengan visi terciptanya transformasi sosial. Ilmuwan kritis didorong untuk merehabilitasi aneka patologis sosial dengan kejujuran akademik (*academic honesty*) sebagai dirinya secara otentik. Sekalipun ada prosedur yang wajib diikuti, tapi tidak pernah ilmunan didikte. Metode melayani kebutuhan peneliti; peneliti tidak pernah menjadi budak prosedur dan teknik (Steven J. Taylor, 2015). Kajian ini bertujuan untuk meninjau politik represif yang menskematisasikan tendensi media untuk kebijakan eksklusi warga Besipae. Dari metode ini timbal balik dengan teori Adorno, dialektika negatif untuk mengoreksi pemerintah yang berkuasa ternyata dapat salah, karena itu disensus terhadap kekuasaan adalah prinsip pembangunan yang egaliter, memanusiakan manusia dan melestarikan alam. Sebab pada galibnya, "*the king can do wrong!*"

Metode kritis menyajikan informasi tentang fenomena yang diteliti, informan penelitian, dan lokasi penelitian (Steven J. Taylor, 2015). Peneliti menyajikan data pemberitaan seputar Besipae, menemukan fakta-fakta baru yang lebih akurat, mengkategorikan dan

mengklasifikasi jenis, serta mendokumentasikan proses. Sebagaimana kehendak penelitian ini ialah untuk meninjau dengan pembacaan yang cermat langgam tren media hegemonik terhadap warga adat Besipae. Karena ketidakadilan yang mengakrabi kehidupan harian warga, mereka lebih khusus perempuan dan anak diasumsikan mengalami banyak momen represi *policy* yang totaliter tetapi pura-pura toleran. Obyek kajian studi ini ialah meninjau melalui wacana dialektika negatif dan dekonstruksi untuk memposisikan dimensi konflik Besipae itu lebih adil dan adaptif. Subyek kajian pada gilirannya ditentukan melalui *purposive sampling*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam spektrum pemberitaan, informasi adalah sumber daya dominan yang dibutuhkan warga untuk pencerdasan publik. Setiap informasi dapat dimanfaatkan secara impresif sekaligus negatif tergantung kepentingan. Namun oleh penguasa dan pebisnis, informasi menjadi modal dan variabel penentu untuk perebutan suara dalam formasi pemilu dan memenangkan suatu desain kebijakan publik.

Melalui rezim informasi seyogyanya menampilkan ideal-ideal demokrasi tetapi rezim ekonomi dan materialisme tampil lebih mengekang dan cenderung distorsif mengganti kualitas dari sebuah ide dan tujuan kemaslahatan publik. Konsekuensi logisnya adalah warga Besipae diletakan sebagai objek diskursif yang dikorbankan dengan harga material yang mungkin diperoleh dari

para konglomerasi/industri media. Begitu juga suara atau aspirasi warga dikomersialisasi bahkan diobral dengan balutan pemberitaan untuk memuaskan kebutuhan berita, *logic of news*, yaitu keinginan untuk selalu mengakses berita-berita baru. Harga diri dan aspirasi warga Pubabu diobral sama padahal dalam rezim demokrasi adalah suatu perjalanan merawat nalar kritis demi pencerahan publik. Oleh sebab itu, usaha dalam konteks mengentas dimensi dominasi informasi, pertama, mendekonstruksi wacana informasi, dan kedua adalah mengonstruksi informasi yang kredibel dan pro pada kebutuhan warga Pubabu dan eksistensi ekologisnya. Usaha konsekuen dalam industrialisasi media kontemporer adalah bukan untuk sibuk mendiskusikan dampak ekonomis dari eksploitasi Pubabu, ilusi pembangunan, padahal dimensi yang absen dari *vocabulary* demokrasi kini adalah radikalisi perjuangan hegemonik untuk merebut dimensi kewargaan inklusif-informatif (Syaiful, 2013)(Juru, 2013). Diskusi kewargaan inklusif hadir untuk mendekonstruksi jejak kerentanan dan pemanfaatan media dalam kerangka dominatif.

Operasi pembangunan Pemerintah Nusa Tenggara Timur oleh mantan gubernur Victor Laiskodat melalui kanal surat kabar *Victory news* menciptakan jejaring oligarkis sehingga menjinakan

dimensi aktus dan nalar kritis publik. Manipulasi informasi menjadi bahasa kemenangan terhadap reduksi dimensi demokrasi kita. Kekuasaan secara intens dan produktif merepresentasikan diri secara totalistik. Pada akhirnya warga terbenam dalam ilusi pembangunan yang diproyeksikan oleh media massa dengan motif mensintesis tujuan-tujuan pembangunan. Penunggalan realitas pembangunan dengan sendirinya memerlukan dialektika negatif seperti diserukan oleh Adorno.

Ketika kekuasaan memakai media propaganda dan serentak sebagai pemilik media maka konglomerasi media dapat mengekang dan mendistorsi kesadaran politik warga. Untuk mengkonfrontir informasi mereka memanfaatkan uang, kekaisaran media, partai politik, perusahaan, untuk menjalankan strategi politik pertahanan kekayaan (Savirani, 2021). Titik tolak untuk memahami dominasi dan distorsi informasi kontemporer ialah menyadari bahwa kesenjangan informasi yang ekstrim menyebabkan ketidaksetaraan dan kesenjangan informasi yang juga ekstrem. Sumber daya informasi adalah media yang nampak serba guna, tidak terbatas, luwes dan produktif dengan tren pemberitaan yang justru mengukuhkan resim pembangunan dan pertumbuhan.

Tabel 1. Identifikasi sumber berita seputar Pubabu

POS KUPANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://kupang.tribunnews.com/2023/08/01/aktivis-besipae-divonis-enam-bulan-penjara-pengacara-sebut-nikodemus-manao-tak-ajukan-banding 2. https://kupang.tribunnews.com/2022/10/27/kasus-besipae-tts-para-okupan-enggan-bertemu-gubernur-ntt 3. https://kupang.tribunnews.com/2022/10/20/besipae-tts-kembali-memanas-pemprov-ntt-gusur-rumah-warga
VICTORY NEWS	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.victorynews.id/ntt/pr-331528877/kasus-besipae-pemprov-ntt-tak-hanya-rumah-pemerintah-juga-siapkan-lahan-untuk-okupan 2. https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315351705/gubernur-ntt-hentikan-eksploitasi-anak-anak-di-besipae-mari-berkolaborasi
BERTIA ONLINE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salmon, T. (2020). <i>Aksi Telanjang Pemprov NTT Bakal Polisikan Warga Besipa'e TTS</i>. Retrieved August 8, 2020 2. https://voxntt.com/2020/05/13/aksi-telanjang-pemprov-ntt-bakal-polisikan-warga-besipae-tts/62864/

Sumber: Olahan penulis 2025

Semakin tidak meratanya distribusi informasi dan semakin dibesar-besarkannya perbedaan pemberitaan maka semakin intens mewarnai pengaburan makna di level perjuangan masyarakat sipil dan kebutuhan dasar warga (*basic needs of citizen*). Kesenjangan informasi seputar konflikual Pubabu inilah yang membentuk dan mendominasi serta mendistorsi politik dan demokrasi. Kekuasaan informasi adalah kekuatan dengan begitu berpengaruh selama masa pemilu dan praktik demokrasi dagangan pro

terhadap kemunculan elit politik untuk kembali dengan sekali lagi berpihak pada kontrol informasi.

Oleh sebab itu, hanya melalui partisipasi kewargaan memungkinkan spirit dialektika negatif untuk tidak menerima begitu saja trend pemberitaan bombastis tentang kesuksesan dari sebuah rezim pembangunan dari pemerintah NTT seputar Pubabu. Sebab dalam rezim itu telah berjejaring relasi kuasa di antara pemerintah, media, pebisnis, atau yang umum disebutkan sebagai, "*it's the oligarchy stupid!*"

Tabel 2. Identifikasi Tren Berita dan Jejaring Oligarki

Media	Tren Berita	Jejaring Oligarki
Pos Kupang	Agitatif, "Abu-abu," Kompromistis	Kompas, MNC, etc
Victory News	Agitatif, Propoganda, <i>Success stories</i> Pemerintah	Media Indonesia, Media Group, Nasdem, etc
Media online	"Abu-abu," Zona nyaman, <i>Viewers oriented</i>	?

Sumber: Olahan penulis 2025

Ada berbagai alasan mengapa perlu melakukan dekonstruksi tren pemberitaan berita. Dekonstruksi disini ialah sebagai pembongkaran tetapi tidak dengan peralatan raja (*the master's tools will never dismantle the master's house*). Tetapi suatu pembongkaraan yang dilakukan sendiri untuk menemukan basis emansipasi berita. Pembongkaran dan penghancuran tidak menjurus kepada kekosongan/nihilisme. Dekonstruksi disini datang dengan semangat keterbukaan dengan menggugat semua kemapanan media yang mengikuti *owner interest*. Ada beragam motif/intensi pemilik media, untuk itu cara terbaik ialah membongkar tingkat inkonsistensi (respon kognisi, atau tanggapan yang melibatkan gagasan) dan kegelisahan (yang demagogis, atau perasaan, dan tanggapan). Meningkatnya derajat inkonsistensi dan hegemoni media akan menghambat pemaknaan keadilan dan keterlibatan (*sorge*) pada warga dalam memanfaatkan tanahnya.

Dekonstruksi dalam trend pemberitaan media hendaknya tidak dilepaskan dari tanggapan atas problem *gender* dan krisis iklim yang mencari kemapanan dan mengorbankan yang lain. Dekonstruksi sebagai strategi untuk memeriksa sejauh mana struktur yang terbentuk dimapankan batasnya serta ditunggalkan definisinya. Dalam mekanisme dekonstruksi, potensi ideal tentu menyatu dalam setiap diskursus. Dalam hal ini, situasi dominasi pemberitaan dalam menyudutkan warga Besipae, dapat digambarkan sebagai jejak yang perlu dihapus. Pembongkaran di antara mereka seharusnya bebas dari

penipuan diri, strategi, dan penggunaan kekuasaan.

Di tengah dominasi nilai “*developmentalisme dan growth*” yang kian menguat turut mengalienasi warga lokal (Kosat et al., 2024). Melalui dekonstruksi tren pemberitaan memacu dinamika serta merangsang warga untuk selalu dinamis mmengekspresikan hak (*claim of right*) yang lebih benar, lebih baik, dan lebih menarik. Dekonstruksi disini dimengerti sebagai penalaran yang diusulkan melalui upaya-upaya dialektis yang berorientasi pada gerak emansipasi berita.

Untuk memudahkan bangun berpikir dari suatu berita yang rasional dan respek pada kerentanan kebutuhan serta keinginan Warga Besipae, usulan dekonstruksi dalam adalah sesuatu yang tidak bisa tidak (*conditio sine qua non*). Apabila tidak maka warga akan terobyektivasi oleh model berita yang satu arah. Negara dan warga serta pihak media yang terkait perlu mengadakan diseminasi ide kebijakan (Dunn, 2003) tentang keberadaan dan status warga Besipae. Adapun dekonstruksi menjembatani kepentingan antara aktor atau *stakeholder* negara, warga, dan tanah (hutan adat Besipae).

5. Simpulan

Pemberitaan media massa tentang konflik Warga Adat Besipae mencerminkan dialektika yang tajam seperti dikonstruksi Adorno sebagai konstruksi wacana negara dan narasi tandingan *civil society*. Media tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi ideologis yang mereproduksi kekuasaan, membentuk

opini publik, serta membingkai legitimasi tindakan negara atau resistensi warga. Akar konflikktual pemberitaan ini berpijak pada kepentingan struktural yang menyelubungi kepemilikan media, keberpihakan redaksional, dan relasi ekonomi-politik yang menautkan media dengan aktor-aktor dominan dalam konflik agraria Warga Pubabu.

Alih-alih berfungsi sebagai ruang advokasi kritis, media dalam genggam oligarkis justru seringkali memperlihatkan bias representasi yang mengaburkan posisi subaltern dan mereduksi kompleksitas konflik menjadi isu hukum dari rezim pembangunan semata atau ketertiban. Kendati demikian, munculnya jurnalisme alternatif dan media komunitas memberi harapan akan narasi yang lebih adil, partisipatif, dan membela hak-hak masyarakat adat melalui spirit dialektika negatif dengan potensi transformatif dan anti kemapanan. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan etika jurnalistik kritis dan kesadaran publik atas pentingnya membaca media secara reflektif dalam menyikapi isu-isu agraria yang menyentuh nadi kemanusiaan dan keadilan sosial seputar pemberitaan konflikktual Warga Pubabu.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (H. Salmon (ed.)). SAGE.
- Derrida, J, 1995, "Archive Fever," Chicago: The University of Chicago Press
- Dhosa, D. D. (2021). State-led forest development and social protest in east nusa tenggara province. *Forest and Society*, 5(2), 288–303.
<https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11320>
- Dunn Willian N, "Analisis Kebijakan Publik," Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)
- Juru, I. J. (2013). Dislokasi wacana kewarganegaraan: Melampaui liberalisme menuju wacana agonistik. *Yogyakarta: Polgov*.
- Kosat, E., Ina, V., Boro, A., Hurek, U. O., Li, E. D., & Fauth, P. (2024). *Jurnal Public Policy Gendered Vulnerabilities and Policy Gaps : Analyzing Alienation Among Indonesian Migrant Women Workers in Malaysia*. 4.
- Lim, M. (2025). Social Media and Politics in Southeast Asia. In *Social Media and Politics in Southeast Asia* (Vol. 2998). <https://doi.org/10.1017/9781108750745>
- Marx, K. (1887). Capital Volume 1: The Process of Production of Capital. In *Capital Vol. I, Part VIII: Primitive Accumulation*. Progress Publisher.
- Max Horkheimer, & Theodor Adorno. (n.d.). *Dialectic-of-Enlightenment-Max-HorkheDialectic-of-Enlightenment-Max-Horkheimer-Theodor-Adorno*. (n.d.). *imer-Theodor-Adorno*.
- Nakayama, M., Drinkall, S., & Sasaki, D. (2019). Climate change, migration, and vulnerability. In *Journal of Disaster Research* (Vol. 14, Issue 9). <https://doi.org/10.20965/jdr.2019.p1245>

- O'Connor, B. (2004). Adorno's Negative Dialectic. In *Adorno's Negative Dialectic*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1094.001.0001>
- Saito, K. (2023). Marx in the Anthropocene. In *Marx in the Anthropocene*. <https://doi.org/10.1017/9781108933544>
- Savirani, A. (2021). *Prisma, Vol, 45, No. 1, 2021 1. 1*. Steven J. Taylor, et all. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods*.
- Syaiful, N. H. (2013). Merebut Kewarganegaraan Inklusif. In *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*.
- VanderStoep, S. W., & Johnston, D. D. (2009). *Research methods for everyday life: blending qualitative and quantitative approaches* (Vol. 24).